

SALINAN
NOMOR 12/2018

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
ROAD MAP PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
SUB SEKTOR UNGGULAN DAN SUB SEKTOR PRIORITAS KOTA MALANG
TAHUN 2018 – 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan Ekonomi Kreatif di Kota Malang sebagai salah satu program Pemerintah, perlu menyusun *road map* Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Malang baik sub sektor unggulan maupun sub sektor prioritas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang *Road Map* Pengembangan Ekonomi Kreatif Sub Sektor Unggulan dan Sub Sektor Prioritas Kota Malang Tahun 2018 – 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
4. Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Badan Ekonomi Kreatif Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 412).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG *ROAD MAP* PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF SUB SEKTOR UNGGULAN DAN SUB SEKTOR PRIORITAS KOTA MALANG TAHUN 2018 – 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
5. *Road Map* adalah tahapan atau aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan untuk setiap program dan kegiatan, target capaian/hasil, pelaksana, penanggung jawab, dukungan yang dibutuhkan, dan anggaran yang diperlukan (disederhanakan).

6. Ekonomi Kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama.
7. *Road Map* Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah bentuk operasionalisasi pengembangan ekonomi kreatif sub sektor prioritas dengan rencana rinci.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini, yaitu sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi di Kota Malang, Komunitas Ekonomi Kreatif Kota Malang dan Pelaku Usaha sub sektor Ekonomi Kreatif Kota Malang untuk mengembangkan ekonomi kreatif di Kota Malang.

Pasal 3

Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana disusun dalam *Road Map* Pengembangan Ekonomi Kreatif Sub Sektor Unggulan dan Sub Sektor Prioritas Kota Malang bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif baik di lingkungan Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Komunitas Ekonomi Kreatif dan Pelaku Usaha sub sektor Ekonomi Kreatif agar program dan kegiatan yang telah disepakati dapat berjalan secara efektif, efisien, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan dalam mendukung akselerasi pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

BAB III
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
SUB SEKTOR UNGGULAN DAN SUB SEKTOR PRIORITAS

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif Sub Sektor Unggulan dan Sub Sektor Prioritas merupakan proses berkesinambungan dan berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif Sub Sektor Unggulan dan Sub Sektor Prioritas dikelompokkan pada 3 (tiga) Program Utama, sebagai berikut:
 - a. Penyediaan Infrastruktur;
 - b. Pengembangan Ekosistem; dan
 - c. Peningkatan Pemasaran.

Pasal 5

- (1) Proses pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif Sub Sektor Unggulan dan Sub Sektor Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tertuang dalam *Road Map* Pengembangan Ekonomi Kreatif Sub Sektor Unggulan dan Sub Sektor Prioritas Kota Malang Tahun 2018- 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Perencanaan yang berisi detail seluruh program/kegiatan, target, tahapan/aktivitas, perkiraan waktu penyelesaian dan penanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

Agar pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif Sub Sektor Unggulan dan Sub Sektor Prioritas mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan, harus dilakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara berkala, dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Pasal 7

- (1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan setiap enam bulan sekali oleh pelaksana Komite Ekonomi Kreatif Kota Malang.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam bentuk laporan yang disampaikan kepada Pembina Komite Ekonomi Kreatif Kota Malang.

Pasal 8

- (1) Untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif Sub Sektor Unggulan dan Sub Sektor Prioritas, setiap 1 (satu) tahun sekali Komite Ekonomi Kreatif melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatannya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khususnya di lingkungan Pemerintah Kota Malang dilakukan paling tidak berdasarkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing PD sebagaimana diuraikan dalam *Road Map* Pengembangan Ekonomi Kreatif Sub Sektor Unggulan dan Sub Sektor Prioritas Kota Malang.

- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun dalam bentuk laporan dan disampaikan kepada Pembina Komite Ekonomi Kreatif Kota Malang.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 3 April 2018

Pjs. WALIKOTA MALANG,

ttd.

WAHID WAHYUDI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 3 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2018 NOMOR 12

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SEKRETARIAT DAERAH
FABRANI, S.H. M.Hum.
Pembina
NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 12 TAHUN 2018
TENTANG
ROAD MAP PENGEMBANGAN EKONOMI
KREATIF SUB SEKTOR UNGGULAN DAN
SUB SEKTOR PRIORITAS KOTA MALANG
TAHUN 2018 - 2022

ROAD MAP PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF SUB SEKTOR
UNGGULAN DAN SUB SEKTOR PRIORITAS KOTA MALANG TAHUN 2018 -
2022

I. Latar Belakang

Saat ini kita telah berada di era revolusi industri 4.0. Sebuah zaman dimana industri tidak lagi tentang mekanisasi, kekuatan mesin uap, dan mesin pemintal tekstil seperti pada era revolusi industri 1.0. Industri juga bukan lagi tentang produksi massal, perakitan, dan hasil dari energi elektrik seperti pada era revolusi industri 2.0. Pun bukan lagi tentang pengotomatisasian, komputerisasi atau elektronifikasi seperti era revolusi industri 3.0.

Saat ini, kita berada pada zaman dimana konsep sistem daring (*cyber physical system*), konsep internet untuk segala atau IoT (*internet of things*), dan konsep berjejaring (*networks*) adalah definisi industri yang tak terbantahkan.

Ketiga konsep definitif tersebut membentuk struktur ekonomi baru yang disebut sebagai ekonomi kreatif. Dimana industri yang terbentuk karenanya kemudian disebut sebagai industri kreatif.

Para pelaku dari industri kreatif ini kemudian berkelompok dan bersinergi dengan stakeholder lainnya demi melahirkan struktur ekonomi kreatif yang merepresentasikan keunikan dan nilai lebih sebuah produk atau jasa.

“Ekonomi kreatif harus menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia” (Joko Widodo, presiden RI) merupakan pernyataan yang menjadi dasar dibentuknya Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) pada tanggal 20 Januari 2015 melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015, merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah untuk menggali potensi Ekonomi Kreatif di Indonesia,

yang diyakini akan menjadi poros perekonomian nasional terbaru di masa mendatang.

Pemerintah Daerah menunjukkan sikap yang konkrue dengan komitmen Pemerintah tersebut dengan menyusun rencana dan mengambil langkah langkah strategis yang koheren demi mewujudkan misi membuat ekonomi kreatif sebagai poros perekonomian daerahnya.

II. Tujuan

Penyusunan *Road Map* Pengembangan Ekonomi Kreatif Sub Sektor Unggulan dan Sub Sektor Prioritas Kota Malang Tahun 2018 – 2022 adalah:

1. Sebagai pedoman bagi aktor-aktor dan/atau pelaku ekonomi kreatif dalam menentukan aktivitas dalam bentuk program dan/atau kegiatan dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif di Kota Malang;
2. Sebagai sarana monitoring dan evaluasi bagi aktor-aktor dan/atau pelaku ekonomi kreatif atas pelaksanaan seluruh program dan/atau kegiatan yang telah disusun.

III. Sasaran

Sasaran dari *Road Map* Pengembangan Ekonomi Kreatif Sub Sektor Unggulan dan Sub Sektor Prioritas Kota Malang Tahun 2018 – 2022 adalah:

1. Pemerintah Daerah sebagai fasilitator dan inisiator pengembangan ekonomi kreatif di Kota Malang;
2. Akademisi dalam hal ini Perguruan Tinggi sebagai fasilitator dalam pengembangan sumberdaya manusia (SDM) yang berbasis kebutuhan industri kreatif;
3. Komunitas dalam hal ini Komunitas sub sektor ekonomi kreatif sebagai fasilitator sekaligus penghubung antara pelaku usaha dengan Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif;
4. Pelaku Usaha atau Bisnis sebagai objek pengembangan ekonomi kreatif yang berkolaborasi dan bersinergi dengan komponen pendukung yang lain (Pemerintah Daerah, Akademisi/Perguruan Tinggi dan Komunitas).

IV. Proses *Road Map* Pengembangan Ekonomi Kreatif Sub Sektor Unggulan dan Sub Sektor Prioritas Kota Malang Tahun 2018 – 2022
Proses Penyusunan *Road Map* Pengembangan Ekonomi Kreatif Sub Sektor Unggulan dan Sub Sektor Prioritas Kota Malang Tahun 2018 – 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penentuan Sub Sektor Ekonomi Kreatif Prioritas Kota Malang
Penentuan Sub Sektor Prioritas Kota Malang dilakukan dengan melakukan Pemetaan secara sederhana atas semua sub sektor yang ada, dengan memperhatikan kontribusi terhadap PDRB Kota Malang, dan ditentukanlah 3 (tiga) sub sektor tersebut, yaitu:
 - a. Kuliner yang berfokus pada ragam olahan keripik;
 - b. Game dan Aplikasi;
 - c. Film, Video dan Animasi.
2. Uji Petik Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Kreatif Indonesia (PMK3I) atas Sub Sektor Ekonomi Kreatif Prioritas Kota Malang
Proses Uji Petik Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Kreatif Indonesia (PMK3I) atas Sub Sektor Prioritas Ekonomi Kreatif Kota Malang diawali dengan penyampaian Sub Sektor Prioritas kepada Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) selaku Lembaga Negara yang mempunyai tugas untuk mengembangkan ekonomi kreatif dalam rangka menentukan Peta Ekonomi Kreatif Indonesia.
Hasil dari Uji Petik Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Kreatif Indonesia (PMK3I) atas Sub Sektor Ekonomi Kreatif Prioritas Kota Malang yang mempertimbangkan komponen Kreasi, Produksi, Konsumsi, Distribusi dan Konservasi serta kapasitas Daya Ungkit sub sektor ekonomi kreatif, maka ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Game dan Aplikasi sebagai Lokomotif sub sektor ekonomi kreatif Kota Malang;
 - b. Bahwa Pemerintah Kota Malang diwakili oleh Walikota Malang berkomitmen untuk mengembangkan sub sektor prioritas yang telah ditetapkan.
3. Penyusunan *Road Map* Pengembangan Ekonomi Kreatif per Sub Sektor Kota Malang
Berdasarkan hasil Uji Petik Penilaian Mandiri Kabupaten/Kota Kreatif Indonesia (PMK3I) atas Sub Sektor Ekonomi Kreatif Kota Malang, maka disusun *Road Map* Pengembangan Ekonomi Kreatif

Sub Sektor Unggulan dan Sub Sektor Prioritas Kota Malang dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Forum Group Discussion (FGD) pada masing-masing sub sektor ekonomi kreatif unggulan dan prioritas.

Pada tahapan ini dilakukan diskusi secara interaktif dengan 4 (empat) aktor utama ekonomi kreatif yaitu Pemerintah Daerah, Akademisi, Komunitas dan Pelaku Usaha dalam rangka mengetahui dan menginventarisasi permasalahan yang dihadapi, upaya pengembangan ekonomi kreatif yang sudah dilakukan dan solusi dan/atau saran masukan atas pengembangan ekonomi kreatif sub sektor prioritas Kota Malang.

Pada FGD ditunjuk perwakilan dari masing-masing sub sektor prioritas yang meliputi Pemerintah Daerah, Akademisi, Komunitas dan Pelaku Usaha untuk merumuskan hasil diskusi dalam bentuk Program dan/atau kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Malang.

- b. Pembahasan Tim perwakilan masing-masing sub sektor ekonomi kreatif dengan Tim Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Malang.

Pada tahapan ini dilakukan penyusunan Program dan/atau kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Malang dalam sebuah matrik dan disepakati dilakukan mulai Tahun 2018-2022.

- c. Penyampaian Draft *Road Map* Pengembangan Ekonomi Kreatif Sub Sektor Unggulan dan Sub Sektor Prioritas Kota Malang Tahun 2018-2022.

Pada tahapan ini dilakukan penyempurnaan hasil matrikulasi atas program dan/atau kegiatan pengembangan ekonomi kreatif sub sektor prioritas Kota Malang dalam bentuk draft Peraturan Walikota Malang.

V. Kesimpulan

Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kota Malang merupakan sebuah tuntutan baik secara kebijakan Pemerintah, maupun kondisi dan dinamika masyarakat Kota Malang yang sangat berpotensi, serta dalam rangka meningkatkan daya saing daerah. Sehingga perlu

disusun sebuah pedoman pelaksanaan berupa program dan/atau kegiatan yang terukur dan bisa dilaksanakan oleh semua komponen pendukung yang ada didalamnya.

Penyusunan Draft *Road Map* Pengembangan Ekonomi Kreatif Sub Sektor Unggulan dan Sub Sektor Prioritas Kota Malang dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan Pemerintah Kota Malang dalam memenuhi keinginan dimaksud. Karena itu, *Road Map* Pengembangan Ekonomi Kreatif Sub Sektor Unggulan dan Sub Sektor Prioritas Kota Malang disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek, jangka menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. *Road Map* Pengembangan Ekonomi Kreatif Sub Sektor Unggulan dan Sub Sektor Prioritas Kota Malang bersifat dinamis, karena memberikan kemungkinan dilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya.

Pjs. WALIKOTA MALANG,

ttd.

WAHID WAHYUDI

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, S.H., M.Hum.
Pembina
NIP. 19650302 199003 1 019



LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR : 12 TAHUN 2018

TENTANG
 ROAD MAP PENGEMBANGAN EKONOMI
 KREATIF SUB SEKTOR UNGGULAN DAN
 SUB SEKTOR PRIORITAS KOTA MALANG
 TAHUN 2018 – 2022.

I. Road Map Pengembangan Ekonomi Kreatif Sub Sektor Game Dan Aplikasi

No.	Program/Kegiatan	Target	Tahapan	TAHUN					Penanggung jawab
				2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Penyediaan infrastruktur pendukung pengembangan industri game dan aplikasi	Tersedianya Pusat pengembangan industri game dan aplikasi	Perencanaan Kebutuhan Pusat Pengembangan industri game dan aplikasi (kompatibilitas, skalabilitas dan kebutuhan nasional)						BARENLITBANG DINAS PERINDUSTRIAN KOMUNITAS PERGURUAN TINGGI
			Detail Engineering Design (DED)						DINAS PERINDUSTRIAN

No.	Program/Kegiatan	Target	Tahapan	TAHUN					Penanggung jawab
				2018	2019	2020	2021	2022	
			Pembangunan pusat pengembangan industri game dan aplikasi						DINAS PERINDUSTRIAN
			Pengadaan kebutuhan pusat pengembangan industri game dan aplikasi						DINAS PERINDUSTRIAN
			Ketersediaan aksesibilitas internet dan peningkatan kapasitas internet diseluruh titik di Kota Malang						DINAS KOMINFO
			Optimasi CSR terkait akses internet						DINAS KOMINFO KOMUNITAS
2.	Pengembangan ekosistem game dan aplikasi Kota Malang	Tersedianya Database pelaku dan pendukung industri game dan aplikasi	Pendataan dan profiling pelaku dan pendukung industri game dan aplikasi						DINAS PERINDUSTRIAN KOMUNITAS

No.	Program/Kegiatan	Target	Tahapan	TAHUN					Penanggung jawab
				2018	2019	2020	2021	2022	
		Penyelenggaraan event game dan aplikasi	Penyelenggaraan conference, expo, kompetisi, pameran, awarding dan Malang <i>IT Day</i>						DINAS PERINDUSTRIAN KOMUNITAS PERGURUAN TINGGI PELAKU USAHA
		Sinergitas antara Pemerintah, bisnis, pengembang, komunitas, dan akademisi	MOU antara Pemerintah Daerah dengan Akademisi (Perguruan Tinggi) terkait Kurikulum penunjang industri Game dan Aplikasi						DINAS PERINDUSTRIAN PERGURUAN TINGGI
			MOU antara Pemerintah Daerah dengan komunitas terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan serta regulasi pendukung pengembangan sub sektor ekonomi kreatif						DINAS PERINDUSTRIAN KOMUNITAS

No.	Program/Kegiatan	Target	Tahapan	TAHUN					Penanggung jawab
				2018	2019	2020	2021	2022	
			MOU antara Akademisi (Perguruan Tinggi) dengan komunitas terkait dengan peningkatan kapasitas SDM berbasis kebutuhan industry						KOMUNITAS PERGURUAN TINGGI
			MOU antara komunitas dengan bisnis terkait kolaborasi ttg pengembangan bisnis						KOMUNITAS BISNIS/INVESTOR PELAKU USAHA
			MOU antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi terkait dengan kurikulum SMK sebagai pendukung ketersediaan SDM berbasis industri						DINAS PENDIDIKAN KOTA MALANG DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR KOMUNITAS

No.	Program/Kegiatan	Target	Tahapan	TAHUN					Penanggung jawab
				2018	2019	2020	2021	2022	
2.		Peningkatan ketersediaan SDM yang berkualitas	Workshop teknis						DINAS PERINDUSTRIAN PERGURUAN TINGGI KOMUNITAS
			Identifikasi kebutuhan kompetensi pelaku oleh industri						KOMUNITAS PERGURUAN TINGGI PELAKU USAHA
			Fasilitasi Lembaga Sertifikasi Profesi di Kota Malang						DINAS TENAGA KERJA PERGURUAN TINGGI
		Tersedianya perusahaan game dan aplikasi yang berkualitas	Kebijakan kemudahan legalitas perusahaan untuk sub sektor Game dan Aplikasi						DPMPTSP
			Fasilitasi Asosiasi industri untuk sertifikasi badan						DINAS PERINDUSTRIAN DPMPTSTP PERGURUAN TINGGI

No.	Program/Kegiatan	Target	Tahapan	TAHUN					Penanggung jawab
				2018	2019	2020	2021	2022	
			Membentuk Inkubator						KOMUNITAS PERGURUAN TINGGI
		Kepemilikan Kekayaan Intelektual	Sosialisasi Pengurusan Kekayaan Intelektual						DINAS PERDAGANGAN KOMUNITAS
			Pengurusan Kekayaan Intelektual						DINAS PERDAGANGAN KOMUNITAS PERGURUAN TINGGI
		Ketersediaan akses permodalan	Fasilitasi peluang investasi						DPMPSTSP KOMUNITAS PERGURUAN TINGGI
			mentoring kepada calon investor oleh AMVESINDO						DPMPSTSP KOMUNITAS KOMUNITAS BISNIS

No.	Program/Kegiatan	Target	Tahapan	TAHUN					Penanggung jawab
				2018	2019	2020	2021	2022	
3.	Peningkatan pemasaran produk dan jasa game dan aplikasi	Terciptanya branding kota malang sebagai pusat pengembangan game dan aplikasi indonesia	Penyediaan hotspot di tiap taman kota dengan kapasitas minimal 100 Mbps						DINAS KOMINFO PERUSAHAAN/BISNIS
			Kampanye Kota Malang sebagai pusat pengembangan game dan aplikasi indonesia						DINAS KOMINFO DINAS PERINDUSTRIAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DINAS PERDAGANGAN KOMUNITAS PERGURUAN TINGGI
		Peningkatan konsumsi produk dan jasa game dan aplikasi oleh industri lokal	Pengembangan produk dan jasa game dan aplikasi untuk industri pariwisata Kota Malang						DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOMUNITAS

No.	Program/Kegiatan	Target	Tahapan	TAHUN					Penanggung jawab
				2018	2019	2020	2021	2022	
			Pengembangan produk dan jasa game dan aplikasi untuk semua sektor di Kota Malang						SELURUH PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN KOTA MALANG PERGURUAN TINGGI KOMUNITAS
		Peningkatan konsumsi produk dan jasa game dan aplikasi oleh industri global	Mengikuti event nasional maupun internasional						DINAS PERINDUSTRIAN DINAS PERDAGANGAN PERGURUAN TINGGI KOMUNITAS
			Kerjasama Pengembangan Bisnis lokal pelaku nasional dan internasional						DPMPSTP DINAS PERINDUSTRIAN PERGURUAN TINGGI KOMUNITAS

II. Road Map Pengembangan Ekonomi Kreatif Sub Sektor Kuliner (Ragam Olahan Keripik)

No.	Program/Kegiatan	Target	Tahapan	TAHUN					Penanggung jawab
				2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Penyediaan infrastruktur pengembangan dan pemasaran produk ragam olahan keripik	Ketersediaan lahan pertanian penyedia bahan baku olahan keripik	Kajian pemanfaatan lahan untuk lokasi sumber bahan baku olahan keripik						BARENLITBANG DINAS PERTANIAN KP PERGURUAN TINGGI
			Pemanfaatan Aset Daerah sebagai lahan pertanian penyedia bahan baku olahan keripik						BARENLITBANG DINAS PERTANIAN KP BPKAD
2.	Pengembangan Ekosistem Kuliner (Ragam Olahan Keripik) Kota Malang	Terciptanya produk dengan kualitas tinggi	Standarisasi proses pembuatan dan mutu						DINAS PERINDUSTRIAN DINAS KESEHATAN PERGURUAN TINGGI

No.	Program/Kegiatan	Target	Tahapan	TAHUN					Penanggung jawab
				2018	2019	2020	2021	2022	
			Sosialisasi proses pembuatan dan mutu						DINAS PERINDUSTRIAN DINAS KESEHATAN PERGURUAN TINGGI
			Melakukan pengawasan atas proses pembuatan dan mutu sesuai standarisasi (termasuk PIRT)						DINAS PERINDUSTRIAN DINAS KESEHATAN
			Sertifikasi halal dan legalitas merek						DINAS PERDAGANGAN PERGURUAN TINGGI PELAKU USAHA
			Penerbitan segel pada produk						DINAS PERINDUSTRIAN DINAS PERDAGANGAN

No.	Program/Kegiatan	Target	Tahapan	TAHUN					Penanggung jawab
				2018	2019	2020	2021	2022	
		Terciptanya ragam olahan keripik	Kajian ragam bahan baku olahan keripik						DINAS PERINDUSTRIAN PERGURUAN TINGGI
			Inovasi olahan produk keripik						DINAS PERINDUSTRIAN DINAS PERDAGANGAN PERGURUAN TINGGI
		Terciptanya standart kemasan produk	Standarisasi bahan kemasan produk (fisik)						DINAS PERDAGANGAN DINAS KESEHATAN
		Terciptanya perusahaan dengan sistem manajemen yang baik	Workshop Management perusahaan						DINAS PERINDUSTRIAN PERGURUAN TINGGI
			Pendampingan Management perusahaan						DINAS PERINDUSTRIAN PERGURUAN TINGGI
		Terpenuhinya legalitas perusahaan	Koordinasi terkait kemudahan legalitas						DINAS PERDAGANGAN DPMPSTP

No.	Program/Kegiatan	Target	Tahapan	TAHUN					Penanggung jawab
				2018	2019	2020	2021	2022	
			Proses Legalitas Perusahaan						DINAS PERDAGANGAN DPMPTSP
	Munculnya pelaku baru (regenerasi)	Mempersiapkan inkubasi							KOMUNITAS PERGURUAN TINGGI
		Pelaksanaan inkubasi (dapur produksi bersama)							KOMUNITAS PERGURUAN TINGGI
	Terpenuhinya akses permodalan	Pengembangan kelompok usaha bersama untuk pengusaha pemula							KOMUNITAS PELAKU USAHA
		Kajian system penjaminan pinjaman oleh pemerintah bagi pelaku usaha							BARENLITBANG
	Terciptanya produk dengan kualitas ekspor	Sosialisasi Standart produk ekspor							DINAS PERDAGANGAN
		Pendampingan pengembangan produk berkualitas ekspor							DINAS PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN

No.	Program/Kegiatan	Target	Tahapan	TAHUN					Penanggung jawab
				2018	2019	2020	2021	2022	
			Melakukan pengawasan produk berkualitas ekspor						DINAS PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN
			Ekspor produk						DINAS PERDAGANGAN
			Terciptanya kualitas perusahaan untuk menunjang ekspor	Pemenuhan Legalitas standart ekspor					
		Terjadinya alih teknologi terbarukan pengembangan ragam olahan keripik	Sosialisasi hasil teknologi						KOMUNITAS PERGURUAN TINGGI
			Pendampingan aplikasi teknologi						KOMUNITAS PERGURUAN TINGGI
		3.	Peningkatan pemasaran produk ragam olahan keripik	Peningkatan jumlah outlet	Pemetaan lokasi potensial outlet ragam olahan keripik				

No.	Program/Kegiatan	Target	Tahapan	TAHUN					Penanggung jawab
				2018	2019	2020	2021	2022	
			Kebijakan pemerintah untuk optimalisasi outlet ragam olahan keripik yang bersegel						DINAS PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DINAS KOMINFO DINAS KOPERASI DAN UM DPMPTSP
			Penambahan outlet baru						KOMUNITAS PELAKU USAHA PERGURUAN TINGGI

No.	Program/Kegiatan	Target	Tahapan	TAHUN					Penanggung jawab
				2018	2019	2020	2021	2022	
		Penjualan secara online	Pendampingan dalam penerapan e-commerce						DINAS PERDAGANGAN KOMUNITAS PERGURUAN TINGGI
		Penyelenggaraan event promosi	Menyelenggarakan event di malang (festival, expo, lomba, dll)						DINAS PERINDUSTRIAN DINAS PERDAGANGAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

No.	Program/Kegiatan	Target	Tahapan	TAHUN					Penanggung jawab
				2018	2019	2020	2021	2022	
			Mengikuti event nasional dan internasional						DINAS PERINDUSTRIAN DINAS PERDAGANGAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		Penguatan media promosi	Koordinasi dengan media, komunitas, dan asosiasi terkait periklanan						DINAS PERDAGANGAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DINAS KOMINFO KOMUNITAS PELAKU USAHA
			Iklan atas produk						KOMUNITAS PELAKU USAHA

III. Road Map Pengembangan Ekonomi Kreatif Sub Sektor Film, Video Dan Animasi

NO.	Program/Kegiatan	Target	Tahapan	TAHUN					Penanggung jawab
				2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Penyediaan Infrastruktur	Tersedianya Gedung pusat pengembangan Sub sektor film ,Video dan Animasi yang memiliki fungsi sebagai <ul style="list-style-type: none"> • Ruang pertunjukan (Bioskop Alternatif) • Open studio untuk produksi Animasi • Pusat Arsip Film , Video dan animasi Kota Malang 	Uji kebutuhan Infrastruktur sesuai dengan Spesifikasi yang diinginkan						BARENLITBANG DINAS PERINDUSTRIAN KOMUNITAS PERGURUAN TINGGI PELAKU USAHA
			DED						DINAS PERINDUSTRIAN PERGURUAN TINGGI
			Pembangunan Infrastruktur dengan kelengkapannya						DINAS PERINDUSTRIAN PERGURUAN TINGGI
			Peningkatan Infrastruktur Akses Internet dari aspek <ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan titik akses 						DINAS KOMINFO
			<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas jaringan Optimalisasi CSR terkait akses internet						DINAS KOMINFO
2.	Pengembangan Ekosistem	Tersedia data potensi Sub sektor film, video dan animasi yang	Pendataan Studio Film, Video, Animasi						KOMUNITAS DINAS PERINDUSTRIAN

NO.	Program/Kegiatan	Target	Tahapan	TAHUN					Penanggung jawab
				2018	2019	2020	2021	2022	
		komprehensif	Penyusunan Standarisasi industri Film, Video, dan Animasi Kota Malang						KOMUNITAS PERGURUAN TINGGI
			Pemetaan Industri						DINAS PERINDUSTRIAN KOMUNITAS
		Tersedianya SDM berkualitas pada Sub sektor Film, video, dan Animasi	Aktivasi <i>teaching factory</i> bekerjasama dengan profesional dan komunitas						DINAS PERINDUSTRIAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOMUNITAS PERGURUAN TINGGI PELAKU USAHA
			<i>Workshop management</i> dan bisnis Dan <i>Workshop</i> Teknis						DINAS PERINDUSTRIAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PERGURUAN TINGGI KOMUNITAS
			Sertifikasi Profesi						PERGURUAN TINGGI KOMUNITAS
			Koordinasi dengan perguruan tinggi di Kota Malang Untuk pembentukan jurusan film						DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PERGURUAN TINGGI KOMUNITAS

NO.	Program/Kegiatan	Target	Tahapan	TAHUN					Penanggung jawab
				2018	2019	2020	2021	2022	
			Adanya jurusan Film di Perguruan Tinggi di Kota Malang						PERGURUAN TINGGI KOMUNITAS
	Adanya Forum Komunikasi Pelaku khususnya Film dan Video		Koordinasi antar pelaku film dan video						PELAKU USAHA FASILITASI MCF
			Pembentukan Forum komunikasi						PELAKU USAHA
	Adanya Industri (Studio/ PH) Film, Video, dan Animasi Kota Malang yang kuat dan munculnya pelaku pelaku industri baru		Koordinasi terkait investasi Untuk ketersediaan akses permodalan						DPMPTSP KOMUNITAS PERGURUAN TINGGI PELAKU USAHA
			Koordinasi terkait kemudahan legalitas						DPMPTSP KOMUNITAS PERGURUAN TINGGI
			Koordinasi pemerintah Kota Malang dengan Pemerintah Pusat dan pihak swasta terkait pendanaan produksi film						DPMPTSP KOMUNITAS PERGURUAN TINGGI
			Ketersediaan dana untuk produksi						INVENSTOR

NO.	Program/Kegiatan	Target	Tahapan	TAHUN					Penanggung jawab
				2018	2019	2020	2021	2022	
			Kolaborasi Produksi Film						KOMUNITAS PERGURUAN TINGGI PELAKU USAHA
			Penyelenggaraan film market dan <i>pitch day</i>						DPMPTSP KOMUNITAS PERGURUAN TINGGI
			Pembentukan Inkubator Industri						KOMUNITAS PERGURUAN TINGGI
		Kepemilikan Kekayaan Intelektual	Sosialisasi Pengurusan KI						DINAS PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN KOMUNITAS PERGURUAN TINGGI
			Pengurusan KI						DINAS PERDAGANGAN PERGURUAN TINGGI
		Sinergitas antara Pemerintah, bisnis, pengembang, komunitas, dan akademisi	MOU antara Pemerintah Daerah dengan akademisi/Perguruan Tinggi tentang keberadaan Jurusan Film pada Perguruan Tinggi						DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PERGURUAN TINGGI KOMUNITAS

NO.	Program/Kegiatan	Target	Tahapan	TAHUN					Penanggung jawab
				2018	2019	2020	2021	2022	
			MOU antara Pemerintah Daerah dengan Komunitas Pelaku Indurtri Film untuk bersama sama mengadakan kegiatan <i>workshop</i> dan festival						DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOMUNITAS
			MOU antara akademisi dengan komunitas pelaku film (<i>teaching factory</i>)						KOMUNITAS PERGURUAN TINGGI
			MOU antara Pemerintah Daerah, komunitas pelaku film dengan bisnis (bioskop komersil) tentang penayangan Film Lokal pada Bioskop di Kota Malang						DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOMUNITAS PEMILIK BIOSKOP
			MOU antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi terkait kurikulum pendukung Ekonomi Kreatif pada pendidikan SMK di Wilayah Kota Malang						DINAS PENDIDIKAN KOTA MALANG DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR KOMUNITAS

NO.	Program/Kegiatan	Target	Tahapan	TAHUN					Penanggung jawab
				2018	2019	2020	2021	2022	
			MOU antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dalam rangka dukungan terhadap pengembangan Film, Video dan Animasi (lembaga BPI, PFN, Pusbang)						DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DINAS PERINDUSTRIAN BEKRAF KEMENTRIAN PARIWISATA KEMENTRIAN PERINDUSTRIAN BEKRAF
3.	Peningkatan pemasaran produk	Mengetahui pola pemasaran yang tepat	Melakukan kajian pola pemasaran						DINAS PERDAGANGAN DINAS PERINDUSTRIAN KOMUNITAS PERGURUAN TINGGI
		Penyelenggaraan Event <ul style="list-style-type: none"> • Festival Film • Pameran Videografi (Non Wedding) • Festival Animasi 	Penentuan <i>Posisioning</i> Festival Film						KOMUNITAS PERGURUAN TINGGI
			Penyelenggaraan Festival Film						DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PERGURUAN TINGGI KOMUNITAS

NO.	Program/Kegiatan	Target	Tahapan	TAHUN					Penanggung jawab
				2018	2019	2020	2021	2022	
			Festival Animasi						DINAS PERINDUSTRIAN PERGURUAN TINGGI KOMUNITAS
			Penyelenggaraan Pameran Video						DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DINAS PERINDUSTRIAN PERGURUAN TINGGI KOMUNITAS
		Meningkatnya Konsumsi produk di tingkat lokal	Optimalisasi Peran Bioskop Lokal dalam memfasilitasi industri lokal (Film, animasi , video) Bisa juga dalam bentuk Iklan & profil)						DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DINAS PERINDUSTRIAN DINAS PERDAGANGAN KOMUNITAS
			Optimalisasi kanal digital sebagai portal publikasi karya Film, Video, Animasi Kota Malang						DINAS KOMINFO PERGURUAN TINGGI KOMUNITAS
			Pengembangan produk dan jasa animasi untuk pendidikan dasar Kota Malang						DINAS PENDIDIKAN KOMUNITAS

NO.	Program/Kegiatan	Target	Tahapan	TAHUN					Penanggung jawab
			dan jasa animasi untuk semua sektor (pariwisata, periklanan dll) di kota malang						DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DINAS DUKCAPIL DINAS KESEHATAN PERGURUAN TINGGI
			Pendataan event nasional dan internasional dan berpartisipasi pada event tersebut						DINAS PERINDUSTRIAN DINAS PERDAGANGAN DINAS BUDPAR KOMUNITAS PERGURUAN TINGGI

WALIKOTA MALANG,

ttd.

WAHID WAHYUDI



Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRAN, SH. M.Hum.

Pembina

NIP. 19650302 199003 1 019